

Pelatihan Literasi Keuangan untuk Penguatan Serikat Pekerja

Financial Literacy Training for Strengthening Labor Unions

Daryanto Hesti Wibowo ^{1*}

Bambang Irawan ²

Fajarina ³

¹Department of Accounting, Esa Unggul University, Indonesia

²Computer Science Department, Esa Unggul University, Indonesia

³Department of Communication Science, Esa Unggul University, Indonesia

email:

daryanto.hesti@esaunggul.ac.id

Kata Kunci

Laporan Keuangan
Literasi Keuangan
Serikat Pekerja

Keywords:

Financial Statements
Financial Literacy
Labor Unions

Received: December 2025

Accepted: March 2026

Published: May 2026

Abstrak

Literasi keuangan bagi serikat pekerja ini dilatarbelakangi rendahnya kemampuan pengurus serikat dalam membaca laporan keuangan perusahaan sehingga posisi tawar dalam perundingan hubungan industrial cenderung lemah dan reaktif. Kegiatan pengabdian bertujuan memperkuat kapasitas teknis serikat melalui pemahaman dasar laporan keuangan, teknik negosiasi berbasis data, serta pemanfaatan teknologi digital untuk komunikasi dan pengelolaan organisasi. Program diselenggarakan satu hari dalam bentuk pembelajaran campuran yang menggabungkan pemaparan konsep, studi kasus, teknik negosiasi, dan pengenalan buku serta aplikasi literasi keuangan, dengan evaluasi melalui kuesioner sebelum dan sesudah pelatihan serta umpan balik terbuka peserta. Hasil menunjukkan peningkatan pengetahuan dan kepercayaan diri peserta dalam menganalisis informasi keuangan, tingginya apresiasi terhadap relevansi materi dan kompetensi fasilitator, serta munculnya rencana konkret untuk menggunakan hasil pelatihan dalam agenda perundingan dan penguatan administrasi serikat, meskipun masih terdapat kendala berupa keterbatasan akses terhadap laporan keuangan perusahaan, resistensi manajemen terhadap transparansi, dan keterbatasan waktu pengurus. Simpulannya, literasi keuangan dapat menjadi daya ungkit penting bagi serikat pekerja untuk bergerak dari pola ketergantungan menuju kemampuan bertindak otonom berbasis pengetahuan, sehingga perlu pelatihan lanjutan yang lebih mendalam, pendampingan pasca *workshop*, dan pengembangan dukungan kelembagaan agar penguatan kapasitas ini berkelanjutan.

Abstract

Financial literacy among labor unions is motivated by the limited ability of union leaders to read company financial reports, resulting in a weak, reactive bargaining position in industrial relations negotiations. The outreach activity aims to strengthen unions' technical capacity by providing a basic understanding of financial reports, data-based negotiation techniques, and the use of digital technology for communication and organizational management. The program was held over one day in a blended learning format that combined concept presentations, case studies, negotiation techniques, and an introduction to financial literacy books and applications, with evaluation through pre- and post-training questionnaires and open participant feedback. The results show an increase in participants' knowledge and confidence in analyzing financial information, high appreciation for the relevance of the material and the facilitators' competence, and the emergence of concrete plans to use the training results in the union's negotiation agenda and administrative strengthening, despite obstacles such as limited access to company financial reports, management resistance to transparency, and time constraints for administrators. In conclusion, financial literacy can be an important lever for labor unions to move from a pattern of dependency to knowledge-based autonomous action. Therefore, more in-depth follow-up training, post-workshop mentoring, and the development of institutional support are needed to ensure that this capacity-building is sustainable.



© 2026 Daryanto Hesti Wibowo, Bambang Irawan, Fajarina. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). DOI: <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v11i5.11858>

PENDAHULUAN

Era industri 4.0 dan ketidakpastian ekonomi global, serikat pekerja dihadapkan pada tantangan kompleks dalam memperjuangkan kesejahteraan anggota. Salah satu hambatan struktural adalah ketimpangan informasi keuangan antara manajemen dan serikat – di mana serikat kerap bergantung pada narasi manajemen tanpa verifikasi data (ILO, 2022). Padahal, kemampuan membaca laporan keuangan (neraca, laba rugi, arus kas) merupakan prasyarat untuk negosiasi yang efektif, transparan, dan berkelanjutan (World Bank, 2020). Terkait hubungan industrial, keterbatasan ini membuat serikat kurang mampu menguji klaim seperti “perusahaan merugi” atau “beban gaji terlalu tinggi” dengan membaca laporan laba rugi, neraca, dan arus kas, padahal data keuangan seringkali menunjukkan ruang fiskal yang masih memadai untuk perbaikan upah atau jaminan kerja. Tanpa kapasitas analisis laporan keuangan, strategi serikat cenderung reaktif dan bertumpu pada argumen normatif, bukan berbasis bukti, sehingga memudahkan manajemen untuk menolak tuntutan dan sekaligus menurunkan kepercayaan anggota terhadap efektivitas organisasi. Temuan temuan ini menguatkan pentingnya program literasi keuangan dan pelatihan analisis laporan keuangan yang terstruktur bagi serikat pekerja agar daya tawar dan legitimasi mereka dalam perundingan dapat meningkat secara berkelanjutan (Lestari *et al.*, 2024). Literasi keuangan merupakan hal penting bagi serikat pekerja, terutama dalam konteks memahami kondisi keuangan Perusahaan (Hamzah *et al.*, 2025; OECD, 2022). Namun banyak anggota serikat pekerja yang tidak memahami laporan keuangan perusahaan, seperti neraca dan laporan laba rugi. Hal ini mengakibatkan ketidakmampuan dalam menilai kesehatan finansial perusahaan dan memengaruhi kemampuan dalam bernegosiasi memperjuangkan hak dan kesejahteraan karyawan seperti upah dan tunjangan. Serikat pekerja sering kali tidak memiliki dan tidak memahami akses memadai terhadap informasi keuangan yang relevan. Hal ini menghambat dalam mengambil keputusan berbasis data dan analisis akurat. Kondisi saat ini serikat pekerja masih banyak bergantung pada informasi dan opini dari pihak ketiga, yang bisa jadi tidak akurat atau cenderung subjektif. Ketergantungan ini dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan keuangan sehingga tujuan memperjuangkan hak dan kesejahteraan tidak tercapai (Abdullah *et al.*, 2024; Borghesi *et al.*, 2024). Di samping itu, banyak anggota serikat pekerja yang tidak menyadari pentingnya literasi keuangan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam konteks pekerjaan mereka. Hal ini membuat mereka kurang termotivasi untuk belajar dan meningkatkan pengetahuan keuangan mereka. Sebagian besar anggota serikat pekerja tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang pengelolaan keuangan pribadi, termasuk perencanaan anggaran, tabungan, dan investasi (Kementerian Tenaga Kerja RI, 2021). Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mengelola pendapatan mereka secara efektif, yang berpotensi memicu masalah keuangan di masa depan, terutama pada saat terjadi pemutusan hubungan kerja. Situasi yang diuraikan dalam dua paragraf di atas pun persis dialami oleh Federasi Serikat Pekerja ASPEK Indonesia (FSP ASPEK Indonesia). Federasi ini dibentuk sebagai aliansi serikat pekerja di Indonesia untuk memperjuangkan aspirasi karyawan di perusahaan masing-masing atas hak dan kesejahteraan. Federasi ini berdomisili di Cakung Jakarta Timur dipimpin Saudara Abdul Gofur sebagai presiden dengan lebih dari seribu anggota. Beberapa advokasi telah dilakukan antara lain memperjuangkan hak pekerja mitra PT Pos Indonesia dan di beberapa media imbas penurunan kinerja perusahaan. Ia menerangkan, “Seringkali negosiasi peningkatan kesejahteraan karyawan terpatahkan ketika manajemen menyatakan ‘kondisi keuangan perusahaan sedang tidak baik’ tanpa bisa didebat oleh serikat karena minimnya kemampuan membaca dan menginterpretasi laporan keuangan perusahaan.” Lebih lanjut ia berharap, “Literasi keuangan yang baik akan membuat serikat memiliki posisi negosiasi yang lebih baik terhadap manajemen perusahaan.” Rendahnya literasi keuangan serikat pekerja di Indonesia dapat dipetakan dalam hierarki masalah yang mengerucut ke urgensi program pengabdian kepada masyarakat (abdimas), khususnya melalui *Workshop*, pendampingan, dan penguatan digital. Masalah ini tidak hanya bersifat individu, tetapi struktural, yang melemahkan posisi tawar serikat dalam hubungan industrial. Permasalahan ini dapat dipetakan menjadi: akar masalah, masalah utama, dampak langsung dan dampak akhir sebagai berikut. Akar masalah teridentifikasi: 1) Kurangnya akses pendidikan keuangan formal bagi pekerja, terutama di sektor informal dan BUMN, dengan indeks literasi keuangan nasional masih rendah (38,03–66,46 persen pada SNLIK 2021–2025); 2) Keterbatasan kurikulum serikat pekerja yang fokus pada advokasi normatif, bukan kompetensi analisis keuangan.

Sementara itu masalah utamanya adalah ketidakmampuan membaca dan menganalisis laporan keuangan perusahaan (neraca, laba rugi, arus kas), sehingga serikat bergantung pada narasi manajemen yang subjektif dalam perundingan upah, PKB, atau restrukturisasi. Akar masalah dan masalah utama tersebut berdampak langsung pada: 1) Negosiasi lemah: serikat sulit membuktikan “ruang fiskal” perusahaan untuk tuntutan kesejahteraan, menyebabkan debat panjang dan kompromi rendah; 2) Ketergantungan informasi: serikat tidak bisa verifikasi klaim manajemen tentang “kerugian” atau “efisiensi”, melemahkan *bargaining power*. Kondisi ini mengerucut pada dampak akhir berupa: 1) Kesejahteraan karyawan stagnan: upah minimum tidak optimal, program kesejahteraan terbatas, dan pekerja rentan terhadap PHK atau outsourcing; 2) Ketimpangan hubungan industrial: manajemen dominan, serikat terpinggirkan, berkontribusi pada rendahnya inklusi keuangan pekerja (stres finansial, utang konsumtif). Oleh karena itu urgensi program abdimas ini terletak pada solusi strategis dalam mengatasi akar dan *core problem* dengan pendekatan partisipatif: *Workshop* untuk transfer keterampilan dasar, pendampingan untuk aplikasi praktik, aplikasi digital untuk akses berkelanjutan, dan publikasi untuk replikasi. Tanpa intervensi ini, serikat pekerja akan terus berada di posisi inferior, sementara dinamika ekonomi dan bisnis menuntut kemampuan analisis data keuangan untuk melindungi hak pekerja. Abdimas bukan hanya edukasi, tapi pemberdayaan struktural untuk industrial demokrasi berbasis data (Suidarma *et al.*, 2025). Melihat situasi dan kondisi di atas, jelas bahwa ada kebutuhan mendesak untuk program pemberdayaan melalui penguatan literasi keuangan bagi serikat pekerja (OECD, 2023). Terlebih lagi, perusahaan tidak memfasilitasi program pendidikan atau pelatihan terkait literasi keuangan bagi anggota serikat pekerja. Tanpa adanya program ini, anggota serikat pekerja tidak memiliki kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keuangan mereka. Dengan meningkatkan pengetahuan keuangan, anggota serikat pekerja dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan keuangan pribadi dan berkontribusi secara lebih efektif dalam negosiasi dengan manajemen perusahaan demi mengupayakan hak dan kesejahteraan karyawan (Deloitte, 2024).

Uraian di atas mengarahkan tujuan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman anggota serikat pekerja tentang literasi keuangan dan kondisi keuangan perusahaan sehingga dapat meningkatkan objektivitas serikat pekerja terhadap kondisi perusahaan tempat karyawan bekerja.
2. Memberdayakan anggota serikat pekerja untuk mengambil keputusan yang efektif terkait keuangan baik keuangan pribadi maupun dalam negoisiasi terhadap manajemen perusahaan terkait keuangan perusahaan.

Menurut Presiden FSP ASPEK Indonesia, kegiatan terkait literasi keuangan sebelumnya fokus pada pemahaman akuntabilitas organisasi melalui penyusunan laporan keuangan organisasi. Karenanya program literasi keuangan yang membahas kinerja keuangan perusahaan tempat bekerja menjadi amat penting sebagai penentu keberhasilan negosiasi berbasis data keuangan. Penguatan literasi keuangan menjadikan serikat pekerja dapat meningkatkan sikap kritis terhadap kondisi keuangan perusahaan sehingga lebih percaya diri dalam bernegosiasi dengan manajemen. Hal ini tidak semata memperjuangkan hak dan kesejahteraan anggota, namun juga membangun hubungan industrial yang kondusif antara serikat pekerja dan manajemen perusahaan dengan lingkungan kerja yang lebih adil dan produktif. Program ini hadir sebagai respons atas permasalahan tersebut melalui skema Pemberdayaan Berbasis Masyarakat (PBM), Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI. Berbeda dari pelatihan konvensional, program ini mengintegrasikan pendekatan *soft* (kapasitas kognitif dan sikap) dan *hard* (produk teknologi), sekaligus mendorong partisipasi aktif serikat sebagai mitra pelaksana.

METODE

Alat dan Bahan

Program pengabdian kepada masyarakat ini didukung oleh berbagai alat dan bahan untuk mendukung pelaksanaan pelatihan dan pendampingan. Alat utama yang digunakan meliputi *laptop* yang digunakan untuk presentasi materi dan simulasi analisis laporan keuangan. Perangkat layar LED digunakan untuk menampilkan visual paparan dan pengeras suara agar lebih mudah dipahami peserta, sementara *flipchart* dan spidol dimanfaatkan sebagai alat bantu diskusi interaktif.

Copy buku ber-isbn Literasi Keuangan Serikat Pekerja digunakan sebagai acuan materi yang disampaikan pada pelatihan dan pendampingan. Selain itu, materi *pre-test/post-test* serta survei peserta disampaikan secara digital melalui *google form*.

Metode Pelaksanaan

Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk membantu mitra dalam mengatasi permasalahan minimnya literasi keuangan. Padahal kemampuan memahami dan mengintrepretasi laporan keuangan perusahaan amat menentukan dalam negosiasi dengan manajemen perusahaan untuk memperjuangkan kesejahteraan pegawai. Kegiatan ini dilaksanakan melalui tiga tahapan utama yang meliputi: pra-pelatihan, sesi tatap muka dan pasca pelatihan.

1. Tahap Pra Pelatihan

Tahap ini fokus pada penyelesaian masalah utama yang dihadapi oleh mitra yang ditemukan saat identifikasi masalah terkait pemahaman laporan keuangan perusahaan. Aktivitas pada tahap ini meliputi penyusunan materi *pre-test online* (*Google Form*) untuk ukur *baseline* literasi serta penyusunan materi presentasi. Selain itu dengan dukungan mitra sasaran, pengorganisasian sesi tatap muka berupa tempat kegiatan beserta kelengkapan fasilitas penunjang dan tim pendukung pelaksanaan pelatihan (Rohima *et al.*, 2024).

2. Tahap Sesi Tatap Muka

Paparan ringkas oleh tiga narasumber: Dr. Daryanto Hesti Wibowo, Dr. Bambang Irawan dan Dr. Fajarina membahas laporan keuangan sebagai basis negosiasi dan penguatan organisasi serikat dengan pemanfaatan teknologi. Sesi ini juga membahas studi kasus nyata berbasis laporan keuangan perusahaan: perhitungan rasio keuangan, identifikasi *red flags*, serta teknik argumen negosiasi. Peserta diberikan pelatihan tentang konsep dasar laporan keuangan, seperti laporan laba-rugi, neraca, dan arus kas. Sesi ini mencakup teori dan studi kasus. Diskusi interaktif juga dilakukan untuk memperdalam pemahaman peserta (Rahayu, 2024).

3. Tahap Pasca Pelatihan

Tahap ini fokus pada pendampingan serikat pekerja secara tatap muka sebanyak 2 (dua) kali dengan fasilitator Kementerian Ketenagakerjaan RI dan sekali pendampingan pada Serikat Pekerja Antara pada acara rapat kerja tahunan. Pembahasan pada pendampingan ini mengerucut pada permasalahan aktual yang dihadapi oleh masing-masing serikat pekerja. Berdasarkan penelitian, data keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan kelompok tertentu lebih berhasil (Clark, 2023). Selain pendampingan, pelatihan dievaluasi pada tahap ini. Kunci sukses program edukasi keuangan adalah tindak lanjut untuk mempertahankan informasi yang diperoleh partisipan melalui pelatihan (Lusardi *et al.*, 2020).

Tabel I. Tahap pelaksanaan kegiatan literasi keuangan serikat pekerja.

Tahap	Metode	Deskripsi	Durasi
A. Pra-Pelatihan	Diagnostik & Persiapan	Penyusunan materi dan persiapan kegiatan	3 minggu
B. Sesi Tatap Muka	Workshop Interaktif	Pemaparan materi dan diskusi interaktif	1 hari
C. Pascapelatihan	Pendampingan & Penguatan	Pendampingan serikat pekerja dan evaluasi kegiatan	4 minggu

Metode diagnostik pada tahap pra-pelatihan literasi keuangan serikat pekerja bertujuan mengidentifikasi *baseline* kemampuan (*knowledge* dan *skills*) serta latar belakang pendidikan peserta. Data/informasi ini penting untuk merancang intervensi yang tepat sasaran, sekaligus mengukur gap antara kondisi saat ini dengan target pasca-pelatihan. Untuk keperluan ini, *pre-test* pengetahuan teknis disiapkan dengan instrumen soal pilihan ganda, 20–30 soal tentang dasar laporan keuangan (neraca, laba rugi, arus kas), rasio keuangan sederhana (*current ratio*, *profit margin*), dan konsep negosiasi berbasis data (Harter, 2021; Zikri *et al.*, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Workshop Literasi Keuangan Serikat Pekerja yang dilaksanakan pada 12 November 2025 di Antara Heritage Center, Pasar Baru, Jakarta, menjadi tonggak penting penguatan kapasitas Federasi Serikat Pekerja ASPEK Indonesia dalam hubungan industrial berbasis data. Kegiatan ini diikuti 120 peserta yang terdiri dari pengurus DPP, DPC, dan anggota inti dari wilayah DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Kehadiran peserta lintas level struktur serikat menunjukkan adanya komitmen

kolektif untuk menjadikan literasi keuangan sebagai pilar strategis perjuangan kesejahteraan pekerja, bukan sekadar tambahan pengetahuan teknis. *Workshop* dirancang secara partisipatif dengan format *blended learning*: menggabungkan modul cetak ber-ISBN “Literasi Keuangan Serikat Pekerja: Sebentuk Upaya Penguatan” dan aplikasi digital aspek.taplinc.id – *platform* berbasis web yang memungkinkan pengelolaan anggota serikat, kegiatan, serta database pembelajaran daring. Secara umum dengan metode diagnostik, karakteristik peserta yang terekam melalui survei menunjukkan bahwa mayoritas adalah laki laki usia produktif, dengan latar belakang pendidikan didominasi SMA/SMK. Sebagian besar telah aktif di serikat lebih dari lima tahun, namun belum terbiasa menganalisis laporan keuangan perusahaan maupun terlibat langsung dalam perundingan perjanjian kerja bersama (PKB). Kondisi ini menjelaskan mengapa *Workshop* menjadi krusial: ada pengalaman organisasi yang panjang, tetapi belum diimbangi dengan kapasitas teknis untuk membaca neraca, laporan laba rugi, dan arus kas sebagai basis argumentasi dalam negosiasi. Sebelum *Workshop*, 36,4% responden menyatakan tidak pernah menganalisis laporan keuangan, dan hanya 24,2% yang mengaku sering melakukannya. Dari sisi konten, *Workshop* dirancang sebagai *blended learning* yang mengintegrasikan tiga blok utama :

- 1) pemahaman laporan keuangan (laba rugi, neraca, arus kas, dan studi kasus analisis laporan keuangan),
- 2) strategi negosiasi (negosiasi integratif vs distributif, membaca *body language*, simulasi meja perundingan), dan
- 3) pemanfaatan teknologi digital untuk komunikasi dan manajemen organisasi serikat. Penilaian peserta terhadap materi dan pelaksanaan *Workshop* secara umum sangat positif. Rata rata skor berada di atas 4 dari skala 1–5 untuk hampir semua aspek. Skor tertinggi muncul pada pernyataan tentang relevansi pelatihan teknologi untuk operasional serikat dan kompetensi fasilitator (masing masing 4,36), disusul oleh inisiatif konkret setelah *Workshop* (4,33) dan penilaian atas waktu, metode, dan fasilitas *Workshop* (4,30). Hal ini menunjukkan bahwa peserta tidak hanya merasa “tercerahkan” secara konsep, tetapi juga melihat jalur praktis untuk mengaplikasikan materi dalam kerja organisasi sehari hari.

Namun demikian, skor terendah tercatat pada kemampuan membaca neraca (3,61), diikuti pemahaman arus kas (3,79). Pola ini mengindikasikan bahwa laporan laba rugi relatif lebih mudah diterima (rata rata 4,30), sementara struktur neraca dan arus kas masih dirasakan kompleks. Dari perspektif *capability approach* (Sen, 1999), hasil ini dapat dibaca sebagai fase awal pengembangan “kapabilitas keuangan” serikat: pelatihan baru memindahkan peserta dari ketidaktahuan ke pemahaman dasar, tetapi masih membutuhkan pendalaman lanjutan agar kapabilitas tersebut benar benar menjadi kemampuan fungsional yang stabil. Di sisi lain, skor tinggi pada simulasi negosiasi (4,21), teknik negosiasi berbasis data (4,12), dan kemampuan membaca “sinyal keuangan” perusahaan (4,15) memperlihatkan bahwa ketika konsep keuangan dikaitkan langsung dengan praktik negosiasi, peserta merasa lebih relevan dan percaya diri.

Tabel II. Penilaian atas materi dan pelaksanaan pelatihan.

Pernyataan	Rata-rata Skor
Pemahaman laporan laba rugi	4,30
Membaca neraca	3,61
Pemahaman arus kas	3,79
Studi kasus analisis laporan keuangan	4,15
Prinsip negosiasi integratif vs distributif	4,18
Membaca <i>body language</i>	3,94
Simulasi negosiasi meningkatkan kepercayaan diri	4,21
Penggunaan teknologi digital untuk komunikasi	4,06
Relevansi pelatihan teknologi untuk operasional serikat	4,36
Waktu, metode, dan fasilitas <i>Workshop</i>	4,30
Kompetensi fasilitator	4,36
Peningkatan pengetahuan teknis analisis keuangan	4,21
Peningkatan kepercayaan diri dalam negosiasi	4,21
Kemampuan membaca “sinyal keuangan” perusahaan	4,15
Penerapan teknik negosiasi berbasis data	4,12
Penerapan teknologi digital (rapat, laporan, dokumentasi)	4,24
Inisiatif konkret setelah <i>Workshop</i>	4,33

Temuan kualitatif dan kuantitatif pasca *Workshop* mengonfirmasi hipotesis bahwa literasi keuangan meningkatkan daya ungkit serikat pekerja dalam hubungan industrial. Hal ini sejalan dengan *capability approach* (Sen, 1999) dan *empowerment*

theory (Zimmerman, 2000), yang menekankan bahwa pemberdayaan bukan sekadar penambahan informasi, tetapi perluasan ruang gerak nyata aktor untuk bertindak. Dengan pemahaman laporan keuangan, serikat bergerak dari posisi *dependency*—tergantung pada narasi sepihak manajemen, misalnya klaim “perusahaan merugi” tanpa verifikasi—menuju *agency*, yaitu kemampuan bertindak otonom berbasis pengetahuan dan analisis sendiri. Dalam bahasa praksis, beberapa peserta mulai memetakan bagaimana data laba, margin, dan beban tenaga kerja dapat dipakai sebagai dasar kontra argumen dalam perundingan upah berikutnya. Salah satu keberhasilan penting program ini adalah liputan media dan ekspose publik yang mengangkat *Workshop* sebagai inovasi gerakan serikat pekerja. Pemberitaan media menonjolkan pesan bahwa pekerja dan serikat tidak cukup hanya memahami hukum perburuhan, tetapi juga perlu menguasai “bahasa laporan keuangan” agar dapat mengawal transparansi perusahaan dan memperkuat posisi tawar dalam negosiasi. Liputan tersebut bukan sekadar dokumentasi, tetapi menjadi bentuk pengakuan sosial bahwa literasi keuangan serikat pekerja adalah agenda strategis dalam demokratisasi hubungan industrial. Bagi serikat, publikasi ini sekaligus memperkuat legitimasi program di mata anggota, manajemen, dan pemangku kepentingan lain. Liputan media nasional antara lain oleh Kompas.id dalam artikel berjudul “Serikat Pekerja Belajar Baca Laporan Keuangan, Senjata Baru dalam Perundingan Bipihak” (terbit 14 November 2025). Liputan ini tidak hanya menyoroti urgensi literasi keuangan dalam penguatan gerakan buruh, tetapi juga menempatkan *Workshop* sebagai best practice kolaborasi akademisi–serikat–pemerintah daerah. Selain itu, kegiatan juga diliput oleh BeritaSatu, Tirto.id, dan Radio Elshinta, menjangkau audiens lebih luas di kalangan akademisi, pembuat kebijakan, dan organisasi buruh nasional. Dimensi inovatif lain dari *Workshop* ini adalah integrasi antara buku ber ISBN dan aplikasi digital sebagai materi dan medium pembelajaran. Buku literasi keuangan serikat pekerja memberikan legitimasi akademik, rujukan konseptual, dan akses jangka panjang bagi kader serikat yang ingin mengulang atau memperdalam materi. Di sisi lain, aplikasi digital memungkinkan proses belajar berlanjut melampaui ruang dan waktu *Workshop*: peserta dapat mengakses modul, simulasi, template analisis laporan keuangan, serta fitur dokumentasi organisasi secara real time. Kombinasi ini membuktikan efektivitas pendekatan *blended learning* dalam konteks pengabdian kepada masyarakat, sebagaimana ditekankan oleh literatur yang menyoroti pentingnya integrasi media analog dan digital untuk keberlanjutan dampak program (*Alliance for Financial Inclusion*, 2021). Dengan *platform* digital, serikat tidak hanya belajar, tetapi juga mulai membangun infrastruktur pengetahuan organisasi yang tersimpan dan dapat diakses lintas generasi pengurus. Survei pasca *Workshop* juga memotret potensi penerapan hasil pelatihan (*Financial Education Network*, 2024). Sebanyak 9,1% responden telah menggunakan materi *Workshop* dalam aktivitas serikat (misalnya menyusun analisis sederhana atas laporan keuangan perusahaan), sementara 54,5% menyatakan akan menggunakannya dalam enam bulan ke depan. Sisanya (36,4%) masih ragu dan menilai perlu adanya pendampingan lanjutan. Angka ini mengindikasikan bahwa *Workshop* berhasil menyalakan “niat untuk berubah” pada mayoritas peserta, tetapi untuk menjembatani niat menjadi aksi nyata dibutuhkan desain tindak lanjut yang sistematis, seperti klinik analisis laporan keuangan, *coaching* perundingan berbasis data, atau program mentoring antar serikat dalam FSP ASPEK Indonesia. Meski keberhasilan program terlihat jelas, tantangan struktural tetap signifikan. Tabel hambatan menunjukkan bahwa kurangnya akses ke laporan keuangan perusahaan (22 kali disebut) dan resistensi manajemen terhadap transparansi (19 kali) merupakan dua kendala utama dalam penerapan pengetahuan baru. Dengan kata lain, peningkatan literasi keuangan di pihak serikat belum otomatis disertai dengan keterbukaan informasi di pihak perusahaan. Hambatan ini menegaskan pentingnya pendekatan multi level: intervensi tidak dapat berhenti pada peningkatan kapasitas individu atau organisasi serikat, tetapi perlu diperkuat dengan reformasi kebijakan dan dukungan sistemik yang menjamin hak atas informasi keuangan karyawan dan serikat pekerja. Keterbatasan waktu dan kapasitas SDM serikat (8 kali disebut), minimnya dukungan anggota terhadap pendekatan berbasis data (4 kali), serta infrastruktur teknologi yang belum merata (1 kali) semakin menegaskan perlunya strategi jangka panjang yang menggabungkan pelatihan, pendampingan, dan penguatan kelembagaan.

Tabel III. Hambatan utama dalam penerapan materi literasi keuangan serikat pekerja.

Hambatan	Frekuensi
Kurangnya akses ke laporan keuangan perusahaan	22
Resistensi manajemen terhadap transparansi	19
Keterbatasan waktu & kapasitas SDM serikat	8
Minimnya dukungan anggota untuk pendekatan berbasis data	4
Infrastruktur teknologi belum memadai	1

Kebutuhan pelatihan lanjutan terlihat jelas dari topik yang diminta peserta. Analisis rasio keuangan (ROA, ROE, *current ratio*) menjadi topik paling banyak diminta, diikuti etika dan hukum akses informasi keuangan (UU KIP, PP 61/2021), pelatihan manajemen proyek digital untuk serikat, teknik presentasi data keuangan (infografis, *dashboard*), integrasi literasi keuangan dengan isu jaminan sosial dan THR, serta strategi mitigasi *bad faith bargaining*. Daftar ini menunjukkan bahwa peserta siap bergerak dari level pemahaman dasar ke level yang lebih terstruktur: mereka ingin bukan hanya “mengerti laporan keuangan”, tetapi juga mampu mengelola proyek, menyusun presentasi yang meyakinkan, dan memahami koridor hukum ketika menuntut transparansi.

Tabel IV. Kebutuhan pelatihan lanjutan.

Topik	Frekuensi
Analisis rasio keuangan (ROA, ROE, <i>current ratio</i>)	9
Etika & hukum akses informasi keuangan (UU KIP, PP 61/2021)	7
Pelatihan manajemen proyek digital untuk serikat	7
Teknik presentasi data keuangan (infografis, <i>dashboard</i>)	5
Integrasi literasi keuangan dengan Jaminan Sosial & THR	5
Strategi mitigasi <i>bad faith bargaining</i>	4

Berdasarkan keseluruhan temuan, *Workshop* ini dapat disimpulkan sangat berhasil dari sisi penerimaan peserta maupun relevansi materi. Skor tinggi pada aspek relevansi pelatihan, metode, fasilitas, dan kompetensi fasilitator merefleksikan kesesuaian program dengan kebutuhan nyata serikat pekerja. Di saat yang sama, data profil responden dan frekuensi analisis laporan keuangan sebelum pelatihan menegaskan bahwa mayoritas peserta memulai dari baseline literasi keuangan yang rendah, sehingga peningkatan pengetahuan dan kepercayaan diri yang tercatat pasca *Workshop* merupakan capaian substantif. Namun, kesenjangan akses data dan resistensi manajemen menjadi pengingat bahwa pemberdayaan finansial serikat pekerja tidak bisa diserahkan hanya kepada pelatihan, tetapi memerlukan dukungan regulasi, institusi, dan teknologi. Sejalan dengan itu, beberapa rekomendasi kebijakan diajukan untuk memperkuat dan mereplikasi inisiatif serupa. Pertama, pada level regulasi, literasi keuangan bagi serikat pekerja perlu dipertimbangkan sebagai bagian eksplisit dalam pengaturan hubungan industrial – misalnya dimasukkan sebagai salah satu bentuk hak atas penguatan kapasitas dalam undang undang atau peraturan turunan. Kedua, pada level kelembagaan, pembentukan Pusat Literasi Keuangan Serikat Pekerja di bawah koordinasi Kementerian Ketenagakerjaan dapat menjadi simpul nasional yang mengembangkan kurikulum, modul, dan skema akreditasi pelatihan bagi serikat pekerja di berbagai sektor. Ketiga, pada level teknologi, pengembangan versi *offline first* dari aplikasi literasi keuangan serikat menjadi penting untuk menjangkau serikat di daerah industri yang konektivitas internetnya terbatas, sekaligus menjamin keberlanjutan pemanfaatan teknologi dalam situasi infrastruktur yang belum merata (Lusardi *et al.*, 2014; OJK, 2021). Dengan demikian, *Workshop* literasi keuangan serikat pekerja di Antara *Heritage Center* bukan hanya kegiatan satu hari, tetapi titik awal transformasi cara serikat memandang dan menggunakan informasi keuangan dalam perjuangan kesejahteraan. Ia menggabungkan peningkatan kapabilitas individu, penguatan kapasitas organisasi, dan dorongan ke arah perubahan struktural dalam hubungan industrial. Jika rekomendasi tindak lanjut dapat diimplementasikan secara konsisten – melalui pelatihan lanjutan, pendampingan, dan advokasi kebijakan – maka inisiatif ini berpotensi menjadi model nasional penguatan serikat pekerja berbasis literasi keuangan.

Tabel V. Rekomendasi strategis.

Tingkat Intervensi	Rekomendasi
Regulasi	Masukkan literasi keuangan serikat pekerja sebagai komponen wajib dalam revisi Undang-Undang Hubungan Industrial Dorong penerbitan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang kewajiban perusahaan menyediakan laporan keuangan ringkas bagi serikat dalam proses perundingan bipihak.
Institusi	Bentuk Pusat Literasi Keuangan Serikat Pekerja (PLK-SP) di bawah Direktorat Jenderal Hubungan Industrial Kementerian Ketenagakerjaan – sebagai "one-stop solution" untuk pelatihan konsultasi teknis dan advokasi akses data. Libatkan Lembaga Jaminan Sosial (BPJS Ketenagakerjaan) dalam modul integrasi literasi keuangan-jaminan sosial-TIHR.
Teknologi	Kembangkan versi <i>offline-first</i> aplikasi aspek.taplink.id untuk menjangkau serikat di daerah terpencil atau dengan keterbatasan internet. Tambahkan modul dashboard keuangan serikat dan simulasi bad faith bargaining berbasis AI sederhana.
Pendampingan	Adakan pelatihan lanjutan berkala" (2-3x per semester) fokus pada analisis rasio, presentasi data dan manajemen proyek digital Bangun <i>community of practice</i> melalui webinar bulanan dan pendampingan <i>one-on-one</i> oleh relawan akuntan publik.



Gambar 1. Penyampaian materi literasi keuangan oleh narasumber.



Gambar 2. Penyampaian materi literasi keuangan oleh narasumber.



Gambar 3. Serah terima buku dan aplikasi serikat pekerja.

KESIMPULAN

Workshop literasi keuangan serikat pekerja pada 12 November 2025 di Antara Heritage Center berhasil meningkatkan pemahaman dasar peserta mengenai laporan keuangan, teknik negosiasi berbasis data, dan pemanfaatan teknologi digital untuk penguatan organisasi, sekaligus menunjukkan bahwa literasi keuangan mampu memperkuat posisi tawar serikat dalam hubungan industrial. Keberhasilan ini didukung oleh tingginya apresiasi terhadap materi dan fasilitator, serta munculnya inisiatif konkret untuk menerapkan hasil pelatihan meskipun masih dihadapkan pada hambatan struktural seperti keterbatasan akses data keuangan dan resistensi manajemen. Untuk pengabdian selanjutnya, program perlu diperluas dengan pendalaman analisis rasio keuangan dan aspek hukum akses informasi, pendampingan pasca-*Workshop* yang lebih intensif, pengembangan aplikasi yang ramah pengguna dan dapat diakses secara *offline*, serta advokasi multi-level agar literasi keuangan serikat pekerja mendapat dukungan regulatif dan kelembagaan yang lebih kuat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, kami ungkapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atas dukungan finansial melalui Program Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat, Skema Pemberdayaan Berbasis Masyarakat (PBM). Selain itu apresiasi juga kami haturkan kepada FSP ASPEK Indonesia sebagai mitra sasaran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Esa Unggul yang memfasilitasi program ini. Segala upaya menjadi investasi berharga untuk pemberdayaan literasi keuangan serikat pekerja di Indonesia.

REFERENSI

- Abdullah, N. P., Putri Amelia, S., & Widiastiwi, A. R. (2024). Media Hukum Indonesia (MHI) Peran Serikat Pekerja Dalam Menjamin Kesejahteraan Karyawan di Indonesia. *2*(3), 159. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11618290>
- Alliance for Financial Inclusion. (2021). Financial Education Programs Monitoring & Evaluation Toolkit Toolkit 2. <https://www.afi-global.org/wp-content/uploads/2024/10/CEMC-FE-ME-toolkit-2022.pdf>
- Borghesi, R., Chang, K., Park, J. C., & Song, H. (2024). Labor unions and financial statement comparability. *Finance Research Letters*, *62*, 105193. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2024.105193>
- Clark, R. L. (2023). Effectiveness of employer-provided financial education programs. *Journal of Financial Literacy and Wellbeing*, *1*(1), 154–168. <https://doi.org/10.1017/flw.2023.1>
- Deloitte. (2024). *DI_Global-Human-Capital-Trends-2024*.
- Financial Education Network. (2024). Financial Education Measurement and Evaluation (FEME) Framework Why evaluation and measurement of FEP is important? How to use FEME Framework? <https://www.fenetwork.my/wp-content/uploads/2024/01/FEME-Framework-Guidelines.pdf>
- Hamzah, A., & Teti Rahmawati. (2025). Literacy and Skills' Role in Enhancing Handicraft SMEs' Performance and Reporting. *Jurnal Manajemen*, *29*(2), 359–378. <https://doi.org/10.24912/jm.v29i2.2604>
- Harter, C. (2021). Breaking It Down: Disaggregated Personal Finance Test Scores of Teachers and Students. *Citizenship, Social and Economics Education*, *20*(3), 216–233. <https://doi.org/10.1177/20471734211038757>
- ILO. (2022). Social Finance. https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/%40ed_emp/%40emp_ent/documents/publication/wcms_883541.pdf

- Kementerian Tenaga Kerja RI. (2021). Ketenagakerjaan Dalam Data. Kemenaker RI. <https://satudata.kemnaker.go.id>
- Lestari, S. D., Muhdaliha, E., Firdaus, P. M., Suhendra, E. S., & Brabo, N. A. (2024). Financial Literacy at Work: Enhancing Organizational Performance through Employee Training Investments. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 7(2), 721–741. <https://doi.org/10.57178/atestasi.v7i2.865>
- Lusardi, A., Michaud, P.-C., & Mitchell, O. S. (2020). Assessing the impact of financial education programs: A quantitative model. *Economics of Education Review*, 78, 101899. <https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2019.05.006>
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The economic importance of financial literacy: Theory and evidence. *Journal of Economic Literature*, 52(1), 5–44. <https://doi.org/10.1257/jel.52.1.5>
- OECD. (2022). Policy handbook on financial education in the workplace (OECD Business and Finance Policy Papers, Vol. 07). <https://doi.org/10.1787/b2111112e-en>
- OECD. (2023). OECD/INFE 2023 international survey of adult financial literacy. <http://www.oecd.org/termsandconditions>.
- OJK Strategi Literasi Keuangan. (n.d.).
- Rohima, A., Nur Hafizah, A., Khodijah, K., Diva Liyanti, S., Jahrah, S., & Nur Faidah, A. (2024). Membangun Fondasi Keuangan yang Kuat: Hasil Sosialisasi Literasi Keuangan pada Pelajar dan Mahasiswa di Kota Banjarmasin Suggested citation. <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/damhil/index>
- Suidarma, I. M., Yasa, I. W. S., Lestari, P. N. E., & Nuraga, I. K. (2025). Pelatihan Peningkatan Literasi Keuangan Digital Masyarakat melalui Sosialisasi dan Survei Partisipatif di Kelurahan Kesiman, Denpasar, Bali. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 5(4), 1221–1226. <https://doi.org/10.54082/jamsi.1905>
- Widya Rahayu. (2024). Improving Financial Literacy For Low-Income Communities Through Financial Coaching. *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen Dan E-Commerce*, 3(4), 290–295. <https://doi.org/10.30640/digital.v3i4.3900>
- World Bank. (2020). Outlook Lapangan Pekerjaan Indonesia 2020 Laporan Teknis.
- Zikri, K., Dewi, H., Hidayat, W. N., & Devi, E. K. (2024). Edukasi literasi Keuangan Syariah Siswa/siswi Madrasah Aliyah di Tanjung Jabung Timur. *NEAR: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 1–7. <https://doi.org/10.32877/nr.v4i1.1707>